



INSPEKTORAT
KABUPATEN KEBUMEN
Jujur, kompeten, bermanfaat



Pengawasan dan fungsi APIP dalam Percepatan Peningkatan Penggunaan produk Dalam Negeri Kabupaten Kebumen

Oleh :

Siti Durohtul Yatimah

Kebumen, 28 Oktober 2022

BerAKHLAK > **#bangga**
melayani
bangsa

ARAHAN PRESIDEN

Joko Widodo

TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Jokowi Minta Realisasi APBN dan APBD Dipercepat

Rabu, 17 November 2021 | 19:12 WIB
Oleh: Lenny Trisia Tambun / FFS



Joko Widodo. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Jokowi minta pengadaan barang/jasa perhatikan TKDN dan UMKM

Oleh: Abdul Basith Bardan

Rabu, 18 November 2020 15:12 WIB



- 1 Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 2 Tingkatkan Porsi UMK dan Koperasi
- 3 Percepat Penyerapan APBN/APBD

Perubahan Kebijakan Belanja Pemerintah RI

1

Pro UMK Koperasi

- 40% Belanja untuk UMK-Koperasi
- UMK-Koperasi Tak Diutang karena Ada Kartu Kredit Pemerintah

2

Pro Pemerataan Ekonomi

- Pengusaha Lokal Mudah Masuk e-Katalog Lokal Pemda
- e-Katalog Lokal Pemda Dorong Pemerataan Ekonomi ke Seluruh RI

3

Terintegrasi dan Terdigitalisasi

- Terdigitalisasi sejak Perencanaan hingga Pelaksanaan Proyek
- Mengintegrasikan Sistem Informasi Antar Kementerian
- Mengintegrasikan Belasan Marketplace Swasta ke Sistem Belanja Negara

4

Mudah Diakses Dunia Usaha

- Pemangkasan Birokrasi: Mudahkan Produk Masuk Katalog Elektronik
- Target 1 Juta Produk Tayang pada 2022

PERATURAN TERKAIT PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DALAM NEGERI (P3DN)



Keppres
80/2003
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
PBJ
Pemerintah

2

Permenperin 49/M-
IND/PER/5/2009 jo
49/M-IND/PER/5/2009
tentang Pedoman
Penggunaan PDN

4

PP 29/2018 ttg
Pemberdayaan
Industri

6

1

UU 3/2014
Pengganti UU
No. 5/1984

UU 5/1984
tentang
Perindustrian

3

Inpres 2/2009
tentang
Penggunaan PDN
Dalam PBJ

5

Perpres No.
16/2018 diubah
dengan No
12/2021 tentang
PBJ Pemerintah

7

Inpres 2/2022 ttg
Percepatan P3DN,
Produk Usaha Mikro dan
Koperasi dlm rangka
menyukkseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan
Indonesia pd
Pelaksanaan PBJ

MEDIA MONEV WAS P3DN



Reviu/Evaluasi

APIP K/L

QA Entry Data



Retrieve - Data

PPK K/L

Entry Data

MISKIN DATA DIGITAL
KOLABORASI PEMANFAATAN DATA RENDAH



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : PE.11.02/S - 400/K/SU/2022

Jakarta, 25 Mei 2022

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pelaksanaan Monitoring Data P3DN dan
Pengisian Aplikasi Siswas P3DN

**Yth. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
(Daftar Terlampir)
di tempat**

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2022 mengenai Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota untuk memantau pengisian data Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di instansi masing-masing ke dalam aplikasi Siswas P3DN. Data tersebut menjadi bagian hasil pengawasan yang akan kami laporkan kepada Bapak Presiden pada akhir Juni 2022.

Aplikasi Siswas P3DN dapat diakses melalui tautan <https://apip.bpkp.go.id/p3dn/public>. Hal-hal teknis terkait pelaksanaan monitoring data P3DN dan pengisian aplikasi dapat ditanyakan lebih lanjut melalui https://t.me/Helpdesk_P3DN.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

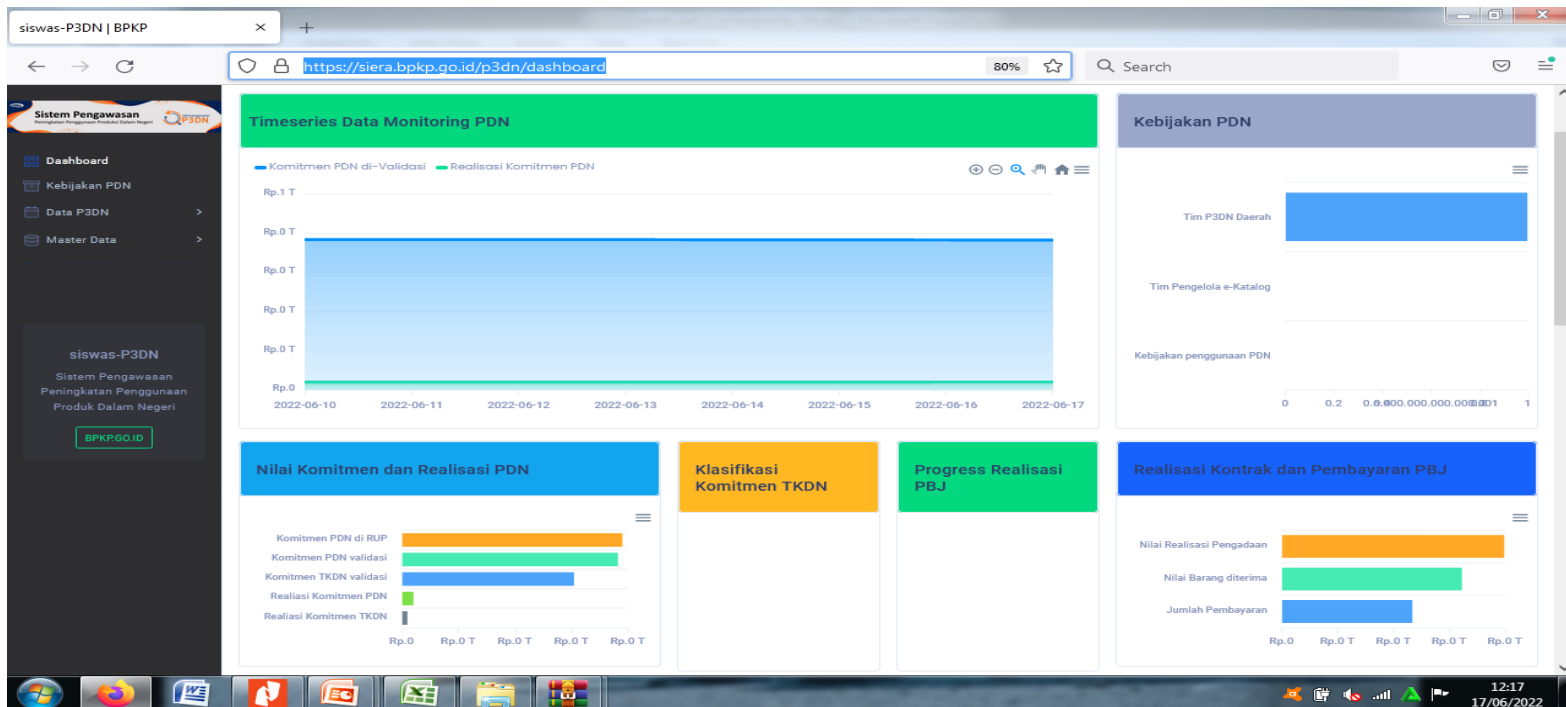
Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan:

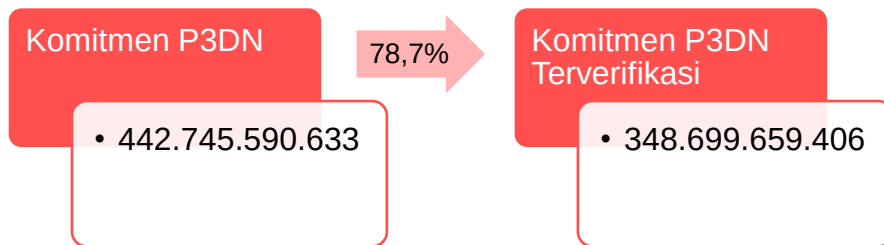
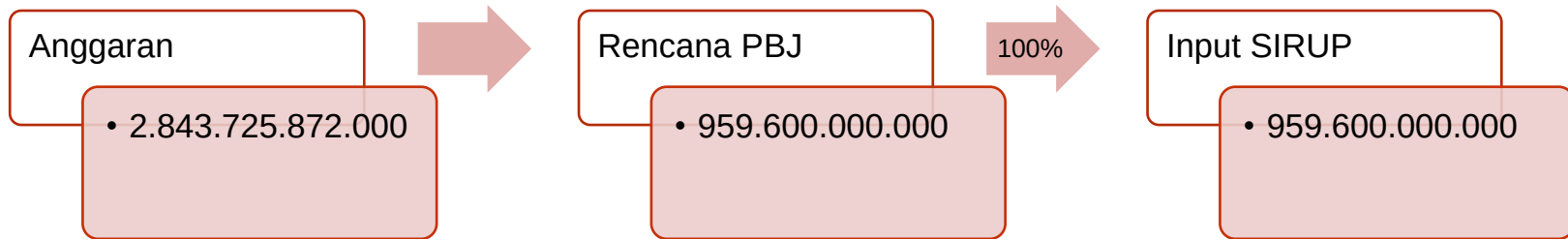
Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

APLIKASI

- Aplikasi yang digunakan dalam penginputan monitoring pelaksanaan P3DN pada aplikasi <https://siera.bpkp.go.id/p3dn/>

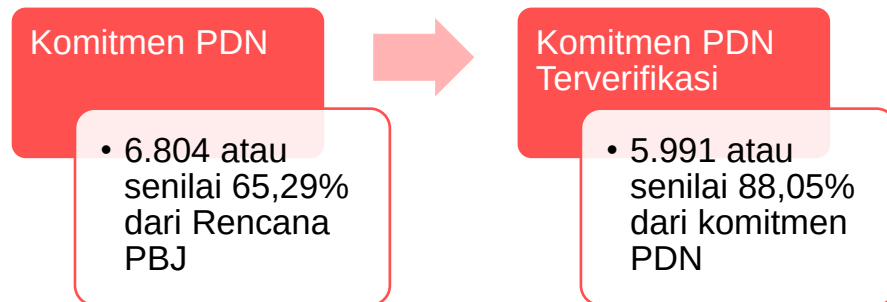
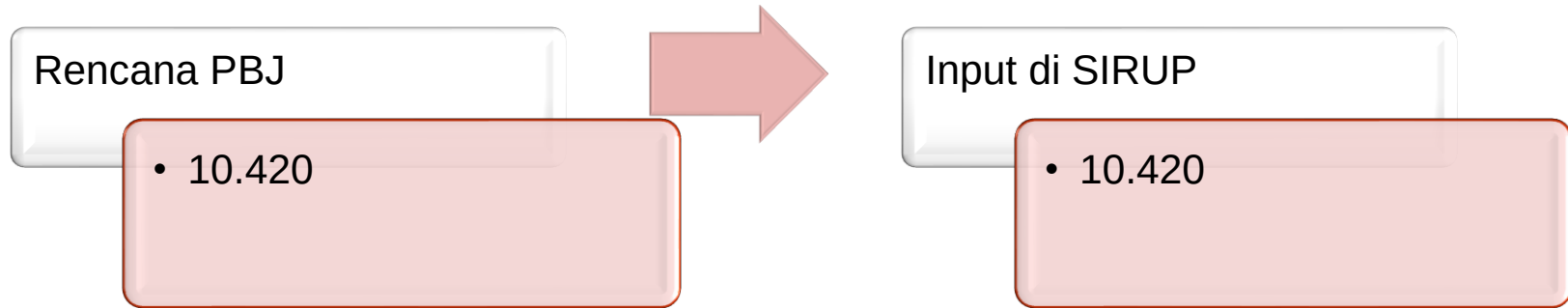


ANGGARAN BELANJA, KOMITMEN PDN, DAN PENGISIAN SISWAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PER TANGGAL 26 OKTOBER 2022



	Total Nilai
Nilai PDN RUP	442.745.590.633
Nilai PDN Validasi	348.699.659.406
Nilai PBJ Realisasi	113.181.172.385
Nilai TKDN Realisasi	72.768.187.360

PAKET BELANJA, KOMITMEN PDN DAN PENGISIAN SISWAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



Uraian	Total Paket
Komitmen PDN	6.804
Verifikasi PPK	5.991
Realisasi Belanja PBJ	1.840
Relisasi Belanja PDN	1.081

MONITORING PADA APLIKASI SISTIM PENGAWASAN P3DN
PADA WILAYAH KERJA PERWAKILAN BKPD DIY , S/D 17 JUNI 2022 JAM 16,30

No	Nama Pemda	Nilai PBJ RUP	Nilai PDN RUP (Rp)	% PDN dari PBJ RUP	Paket PDN RUP	Paket PDN Validasi	Paket PDN Realisasi	Nilai PDN Realisasi	SK Tim P3DN	SK Pengelola e-Katalog
1	KAB. CILACAP	1,563,584,679,705	802,663,015,156	51%	6.380	4.753	621	130.902.729.724	1	1
2	KAB. KEBUMEN	2,915,361,197,251	390,520,313,017	13%	6.343	6.292	1.018	20.350.729.482	1	0
3	KAB. PURWOREJO	938,501,532,092	527,036,013,702	56%	1.250	834	141	37.206.770.510	1	0
4	KAB.MAGELANG	1,727,244,135,075	475,405,804,331	28%	7.225	3.354	610	2.903.973.342	1	1
5	KAB. KLATEN	869,440,250,005	563,641,623,317	65%	8.685	4.786	1.064	62.078.718.161	1	0
6	KOTA MAGELANG	589,421,635,841	239,282,625,127	41%	6.412	6.384	1.794	12.083.857.706	1	1
7	PROVINSI DIY	2,557,378,532,682	1,474,993,859,421	58%	17.690	7.208	1.723	182.976.616.458	1	1
8	KA.KULON PROGO	599,657,785,853	253,284,038,027	42%	5.131	3.994	1.179	16.026.030.724	1	0
9	KABUPATEN BANTUL	1,520,991,422,063	302,872,327,548	20%	1.384	888	240	19.529.374.134	1	0
10	KAB. GNG KIDUL	2,064,634,097,856	320,524,204,129	16%	1.054	619	148	6.497.835.498	1	0
11	KAB. SLEMAN	3,218,600,639,517	857,345,149,880	27%	7.117	4.257	911	73.375.474.661	1	1
12	KOTA YOGYAKARTA	1,803,323,843,753	591,593,743,993	33%	8.580	4.733	905	27.684.515.434	1	1

CATATAN:
E KATALOG LOKAL BELUM
DIBUAT.

No	Nama Satuan Kerja	Paket PBJ RUP	Paket PDN RUP	Paket PDN Realisasi	% PDN Realisasi dibanding PDN RUP	Nilai TKDN Realisasi
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	98	77	77	100%	578.839.022,70
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	170	142	81	57%	320.936.735,75
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	161	131	92	70%	303.525.590,46
4	INSPEKTORAT DAERAH	128	101	71	70%	311.352.656,86
5	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	156	128	24	19%	104.701.263,00
6	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	252	200	85	43%	928.923.300,44
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	161	131	9	7%	112.863.927,50
8	SEKRETARIAT DPRD	307	273	0	0%	0
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN	572	396	10	3%	71.054.489,50
10	DINAS TENAGA KERJA	215	174	61	35%	161.475.816,30
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	159	121	5	4%	242.462.392,00
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	193	167	133	80%	505.595.692,25
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	217	14	8	57%	1.140.172.790,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	203	112	52	46%	669.579.569,20
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	211	164	58	35%	503.994.555,45
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	342	20	15	75%	651.924.000,00
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	809	639	273	43%	51.291.668.465,55
1	RSUD dr SOEDIRMAN	294	150	6	4%	282.910.433,32
2	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	140	102	62	61%	6.390.077.590,60
3	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	131	82	52	63%	716.483.538,40
4	SEKRETARIAT DAERAH	415	315	11	3%	12.114.072,50
5	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	427	319	0	0%	0
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	187	135	32	24%	111.012.300,00
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	956	216	50	23%	3.912.530.514,08
8	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	202	107	28	26%	889.068.631,20
9	RSUD PREMBUN	249	131	18	14%	1.376.671.049,00

CATATAN:
2 OPD BELUM REALISASI PBJ

Tanggal
26 OKTOBER 2022

REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Nilai PDN Realisasi		Nilai PDN Validasi		Prosentase	
Nilai	Paket	Nilai	Paket	Nilai	Paket
109343785837	1825	348699659406	5991	31,3%	30,4%

HAMBATAN CAPAIAN :

- ✓ OPD BELUM MELAKUKAN ENTRY DATA REALISASI SECARA KESELURUHAN DISIERA
- ✓ BELUM SEPENUHNYA MELAKUKAN KOORDINASI, DAN EVALUASI PELAKSANAAN P3DN

KEWAJIBAN KABUPATEN

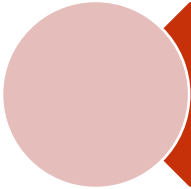
- Melaksanakan *update* kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN.
 - Membuat nilai komitmen pengadaan Produk Dalam Negeri yang direncanakan.
 - Melaksanakan monitoring *Progress* realisasi komitmen belanja produk dalam negeri dalam PBJ.
- 

HASIL REVIU PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TRIWULAN III
TAHUN 2022

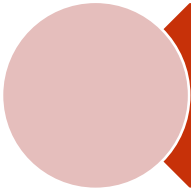
Sample Reviu P3DN Triwulan III Tahun 2022

Jumlah Kontrak : 34

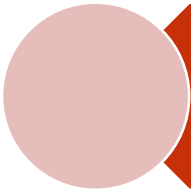
Nilai kontrak : 47.065.702.000



1. Kebijakan P3DN



2. Implementasi P3DN



3. Validitas Perhitungan
PDN/TKDN



Kebijakan P3DN

Institusionalisasi P3DN

- ❑ Telah dibentuk tim P3DN Daerah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/128 Tahun 2022
- ❑ Tim P3DN belum melaksanakan tugasnya secara efektif:
 - belum ada anggaran khusus untuk operasional Tim P3DN;
 - Tim P3DN belum sepenuhnya melakukan koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan P3DN

Dukungan terhadap aspek *Demand*

- Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 975/1433 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring Dan Katalog Elektronik Lokal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
- website yang memberikan layanan pembuatan dan perubahan akun Sistem SPSE bagi pelaku pengadaan di OPD. <https://bag-pbj.kebumenkab.go.id>
- *aplikasi* database penyedia seluruh indonesia dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bisa diakses secara mudah oleh pelaku usaha <https://sikap.lkpp.go.id>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen belum memiliki kebijakan terkait *Roadmap* strategi peningkatan PDN dan pengurangan impor
- Layanan bagi pelaku usaha sebagai penyedia PBJ (SPSE dan SIKAP) belum tersedia pada mall layanan publik.
- belum terdapat kebijakan pemerintah daerah yang memberikan insentif/sanksi atas implementasi P3DN.

Dukungan terhadap aspek *Supply*

Belum memiliki kebijakan untuk mendorong supply PDN :

- kebijakan preferensi harga
- kebijakan/program untuk peningkatan kualitas dan daya saing produk UMK/Koperasi;
- kebijakan pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi pelaku UMK dan/atau Koperasi

Dukungan terhadap aspek Market

- pengelola e-katalog lokal tersebut belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- sudah memiliki beberapa kebijakan terkait kemudahan penyedia barang/jasa untuk masuk dalam katalog local
- belum memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN kepada UMK

Implementasi P3DN

Aspek *Demand*

- Sebagian besar dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa (KAK atau Spesifikasi Teknis) tidak mencantumkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri
- Dokumen evaluasi pengadaan barang dan jasa tidak mempertimbangkan TKDN.
- Dokumen kontrak tidak mencantumkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri

Aspek Supply

Pembinaan pemerintah daerah untuk meningkatkan supply produk lokal belum optimal

Aspek Market

- Pendaftaran produk/jasa dan penyedia ke dalam e-katalog lokal belum diinformasikan mengenai jangka waktu penyelesaian
- Berdasarkan hasil revidi, realisasi pengadaan melalui e-katalog belum ada (belum ada transaksi).

Aspek Pengendalian dan Pengawasan

- Belum ada bukti tertulis terkait bahwa apabila terjadi perbedaan atas perbedaan nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN realisasi
- Belum ada bukti tertulis bahwa Tim P3DN sudah melakukan monitoring dan revidi terhadap implementasi P3DN.

Komitmen dan Realisasi P3DN serta Estimasi TKDN

- Berdasarkan hasil uji kepatuhan :
- belum dilakukan pengutamaan PDN dalam dokumen proses pengadaan dan evaluasi penawaran.
- kemampuan industri dalam negeri belum dijadikan acuan untuk menyusun spesifikasi teknis barang/jasa
- belum dilakukan pengutamaan produk dalam negeri dalam dokumen kontrak/perjanjian pengadaan barang dan jasa/dokumen yang dipersamakan

Realisasi dan Estimasi P3DN

- Belum terdapat dokumen yang menjelaskan realisasi belanja PDN yang dikomitmenkan. Dokumen yang tersedia baru berupa dokumen rencana penggunaan PDN secara global, belum per item produk sesuai RAB, dan belum didukung kertas kerja pendukung

Validitas Perhitungan PDN/TKDN

- Berdasarkan hasil uji validasi terhadap 34 sampling kontrak PBJ, perhitungan PDN/TKDN belum berdasarkan sertifikat TKDN, namun sebagian besar didasarkan pada Pernyataan Penyedia. Pernyataan Penyedia tersebut masih berupa rencana penggunaan PDN secara global, belum per *item* produk sesuai RAB, dan belum didukung kertas kerja pendukung. Terdapat pula kontrak PBJ yang hanya mendasarkan pada kualifikasi yang dijelaskan pada aplikasi pengadaan (LPSE).

CATATAN HASIL REVIU P3DN TW III TAHUN 2022

- **Tim P3DN belum melaksanakan tugasnya secara efektif**
- **Dukungan terhadap aspek *Demand* Produk Dalam Negeri belum optimal.**
- **Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen belum memiliki kebijakan untuk mendorong *supply* PDN.**
- **Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen belum memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN kepada UMK.**
- **Belum terdapat dokumen yang menjelaskan realisasi belanja PDN yang dikomitmenkan**
- **Pengelola e-katalog lokal Kabupaten Kebumen belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- **Website terkait pendaftaran produk/jasa dan penyedia ke dalam e-katalog lokal belum menyajikan informasi mengenai jangka waktu penyelesaian.**

STOP GRATIFIKASI

Dilarang Menerima Dan Memberi Gratifikasi
Dalam Bentuk Apapun



**Burung pipit di atas Jembatan
Terbang berarak sambil bersiul
Ayo P3DN digerakkan
Kebumen semarak makin unggul**

TERIMA KASIH

inspektoratkabkebumen@gmail.com

Telp. (0287)381437, 381319

Fax. (0287)381319

Inspektorat.kebumenkab.go.id

Advisory, Consulting, Quality Assurance